

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengevaluasi laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun dalam bentuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang berarti laporan keuangan berkualitas baik. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menunjukkan bahwa laporan keuangan memiliki berkualitas baik, tetapi ada yang perlu diperbaiki. Apabila laporan keuangan menerima opini Tidak Wajar (TW), ada kemungkinan bahwa terdapat kekeliruan saat membuat laporan tersebut. Dalam kasus dimana auditor tidak dapat memberikan pendapat, laporan tersebut dianggap tidak layak untuk digunakan, dan opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) diberikan. Setiap kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan.

Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan LKPD untuk Tahun Anggaran 2017  
s.d. 2020 di Wilayah D.I. Yogyakarta

<b>No.</b>	<b>Entitas</b>	<b>Tahun</b>	<b>Opini</b>
1	Provinsi DIY	2022	WTP
2	Kabupaten Bantul		WTP
3	Kabupaten Gunung Kidul		WDP
4	Kabupaten Kulon Progo		WTP
5	Kabupaten Sleman		WTP
6	Kota Yogyakarta		WTP

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun Anggaran 2022. Kabupaten Sleman mendapat opini WTP selama 12 tahun berturut-turut, lebih baik daripada empat wilayah lainnya. BPK masih menemukan beberapa masalah dengan pengelolaan keuangan daerah meskipun telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian selama dua belas kali. Meskipun demikian, masalah-masalah ini tidak mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan. Akan tetapi, melalui hasil ulasan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY masih ditemukan ketidaksesuaian terhadap format laporan, regulasi pusat, dan kebijakan akuntansi. Selain itu, kurangnya prasarana kantor yang mendukung operasional BUKP menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh seluruh penyelenggara pemerintahan, hal serupa dengan BPKA Sleman sebagai institusi pengelola keuangan aset pada Pemda Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peneliti memilih Kabupaten Sleman sebagai subjek penelitian karena memiliki kemampuan untuk memberikan opini WTP dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan daerah yang baik. Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan memperoleh predikat WTP.

Sebagai pihak internal dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menggunakan laporan keuangan untuk kepentingan manajemennya. Astuti et al. (2015) berpendapat bahwa laporan keuangan, kumpulan data keuangan, dapat menawarkan keuntungan yang lebih besar bagi penggunanya jika dianalisis lebih teliti. Analisis laporan keuangan mungkin bermanfaat untuk proses perencanaan dan pengendalian, tetapi hanya dalam jumlah kecil. Namun, laporan keuangan dapat membantu dalam evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan kritik yang berkaitan dengan bagaimana memperbaiki kinerja masa depan (feedback value). Laporan keuangan harus disajikan sesuai standar sehingga mereka yang menggunakannya dapat memperoleh manfaat. Namun, entitas pelaporan juga harus mengakui bahwa laporan keuangan memainkan peran penting dalam proses perencanaan dan pengendalian.

Pengelolaan laporan keuangan daerah dengan menggunakan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan aturan yang relevan tercakup dalam penelitian ini. Karena itu, pemerintah daerah telah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), serangkaian proses elektronik dan manual yang mencakup pengumpulan data, pencarian, peringkasan, dan pelaporan status keuangan dan operasi Pemerintah Daerah Astuti et al., (2015). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, SAKD menyediakan catatan pertanggungjawaban yang komprehensif atas pengelolaan uang yang akan digunakan untuk membuat laporan keuangan

pemerintah daerah. Ketika SAKD digunakan sesuai dengan pedoman, laporan keuangan berkualitas tinggi akan dihasilkan (Astuti et al., 2015).

Informasi dan pengungkapan kinerja keuangan pemerintah dapat membantu mengoptimalkan sistem akuntansi keuangan daerah. Untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, sistem pencatatan dan pelaporan harus ditingkatkan dalam sistem akuntansi keuangan daerah Purba & Amrul (2017). Sesuai dengan aksesibilitas laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif. Aksesibilitas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah saling terkait. Pengguna laporan keuangan dapat lebih mudah memperoleh laporan keuangan pemerintah daerah ketika laporan keuangan daerah mudah diakses.

Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah melakukan upaya dengan memberikan keterbukaan mengenai pelaporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan yang dilakukan pemerintah harus didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat diterima oleh masyarakat Fauziyah (2017). Pemerintah daerah tidak hanya harus dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan untuk legislator dan lembaga pengawas, tetapi juga untuk masyarakat yang telah mempercayakan mereka dengan pengelolaan keuangan publik. (Astuti et al., 2015).

Dalam mengantisipasi penyalahgunaan laporan keuangan yang berkelanjutan, pemerintah mengamankan pengendalian internal secara

menyeluruh di seluruh lingkungan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pengendalian internal adalah prosedur yang direncanakan dan dipengaruhi oleh manajemen organisasi, dewan direksi, dan anggota staf lainnya. menurut *The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions*, 2013. Mengevaluasi analisis varians, atau perbedaan, antara pendapatan dan pengeluaran daerah adalah tanggung jawab pengendalian internal untuk memprediksi contoh penyalahgunaan di masa depan. Diharapkan bahwa pemerintah akan dapat memaksimalkan kinerjanya dan meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dengan membangun sistem pengendalian yang efektif. (Astuti et al., 2015).

Dengan penjelasan di atas laporan keuangan harus disusun dengan baik dan benar. Aparatur pemerintah daerah harus berusaha dalam menyusun dan menyajikan suatu laporan keuangan dengan cara yang paling efektif untuk memberikan manfaat bagi para pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha merupakan hal yang sangat penting dalam setiap Tindakan dalam mencapai suatu tujuan. Allah SWT berfirman dalam sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk berusaha:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝ ٣٩

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (Qs. An-Najm:39)

Masalah mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan. Rendahnya kualitas laporan keuangan secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar

akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif terkait erat dengan laporan keuangan dengan nilai informasi berkualitas tinggi. Selanjutnya, suatu kegiatan yang melanggar persyaratan yang relevan dapat dihentikan dengan menerapkan sistem pengendalian internal. Agar menjadi lebih efektif dan efisien serta menghentikan kerugian Negara (Astuti et al., 2015). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Astuti et al., 2015).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal melalui Variabel Intervening Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Sleman”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka peneliti mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?

3. Apakah Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan ?
4. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan ?
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan ?
6. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan dengan Variabel Intervening Kualitas Laporan Keuangan ?
7. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan dengan Variabel Intervening Kualitas Laporan Keuangan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kegunaan Laporan Keuangan

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kegunaan Laporan Keuangan
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kegunaan Laporan Keuangan dengan Variabel Intervening Kualitas Laporan Keuangan
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kegunaan Laporan Keuangan dengan Variabel Intervening Kualitas Laporan Keuangan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai sistem akuntansi keuangan lokal dan sistem pengendalian internal dalam laporan keuangan.

##### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan memberikan peningkatan dalam melaksanakan tanggung jawab, prinsip, dan kegiatan pemerintah daerah dalam mengelola laporan keuangan, kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan keuntungan dan menginspirasi pemerintah daerah

untuk bekerja menuju tujuan mereka, yang meliputi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan keterbukaan informasi bagi masyarakat mengenai laporan keuangan pada Pemerintah Daerah. Dengan adanya peran masyarakat dapat membantu dalam proses pengawasan pada laporan keuangan pemerintahan kepada masyarakat.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dalam penanaman modal terkait wisata di daerah yang perlu dikembangkan untuk membantu perekonomian daerah.